

Pengaruh Sensitivitas Kekayaan Eksekutif terhadap Manajemen Laba
dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel *Moderating* pada
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2005–
2007

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

Memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi



Diajukan oleh:

Nama : Andarias Patiran

NIM : C4C006098

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Agustus 2008

ABSTRACT

The main purpose of corporate governance is to minimize agency cost derived from the separation of property and control (Weber, 2006). Managerial property is one of governance mechanisms used for minimizing agency cost; however, it also creates incentives for a manager who opportunistically manipulates stock price (Stein, 1989). When a firm possess a good corporate governance, the potential of its managers in performing earnings management related to unexpected compensation can be controlled by governance. Therefore, this study research aimed to examine the truth that corporate governance affects relationship between executive wealth sensitivity and earnings management, in which corporate governance was used as a moderating variable.

Population of the study were firms listed by the Indonesia Stock Exchange (IDX). Samples were obtained by a purposive sampling technique using a 2005-2007 list period according to the predetermined criteria. Samples to be collected were 51 firms. Data processing was performed by a pooling method and resulted in 153 observations. Finally, analysis instrument used for testing H1 and H2 hypotheses was a multiple regression analysis.

Analysis resulted in acceptance of H1 since there was a significant and positive relationship between executive wealth sensitivity and earnings management. The result also showed no significant effect of corporate governance moderating variable on the relationship between executive wealth sensitivity and earnings management, leading to H2 rejection.

Keywords: Executive wealth sensitivity, earnings management, and corporate governance.

ABSTRAK

Tujuan utama dari *corporate governance* adalah minimalisasi biaya perusahaan (*agency costs*) yang berasal dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian (Weber, 2006). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme `governance` yang digunakan untuk mengurangi biaya perusahaan; namun, kepemilikan juga menciptakan insentif bagi seorang manajer yang secara oportunistik memanipulasi harga saham (Stein, 1989). Jika suatu perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik, maka potensi seorang manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba yang berhubungan dengan kompensasi yang tidak diinginkan, dapat di kontrol oleh *governance*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran bahwa *corporate governance* mempengaruhi hubungan antara sensitivitas kekayaan eksekutif dan manajemen laba, maka *corporate governance* dimasukkan sebagai variabel *moderating*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dari tahun 2005 s/d 2007 sesuai kriteria yang ditentukan dan diperoleh sampel sebanyak 51 perusahaan. Pengolahan data dilakukan secara *pooling* sehingga diperoleh 153 pengamatan. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk menguji H1 dan H2 adalah analisis regresi berganda.

Hasil analisis mendukung H1 bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sensitivitas kekayaan eksekutif dengan manajemen laba. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa variabel *moderating corporate governance* tidak berpengaruh secara nyata terhadap hubungan antara sensitivitas kekayaan eksekutif dengan manajemen laba, maka H2 tidak diterima.

Kata kunci: **Sensitivitas kekayaan eksekutif, manajemen laba, dan *corporate governance*.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dari perusahaan yang *Go Public* merupakan suatu alat yang sangat penting dan wajib untuk dilaporkan, karena laporan keuangan menurut *PSAK 01 Revisi (98)* adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, para investor dan kreditor yang hendak menanamkan modalnya dapat mempelajari dan mengamati perkembangan perusahaan dari laporan keuangan yang disajikan, karena mereka berharap dapat memperoleh hasil dari yang diinvestasikannya.

Namun, dalam pengelolaan aktivitas perusahaan, seringkali tindakan para manajer bukan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, melainkan justru termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri (Almilia & Silvy, 2006). Kondisi ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer; dimana para manajer yang lebih banyak mengetahui tentang informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang daripada pemilik perusahaan atau para investor (Rahmawati *et al.*, 2006). Jika dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi (Rahmawati *et al.*, 2006).

Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer memiliki asumsi bahwa masing-masing pihak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan, yang dalam teori keuangan disebut konflik keagenan atau *agency conflict* (Almilia & Silvy, 2006). Pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dan pengelola (para manajer) ini juga mengakibatkan pemilik membebankan tanggungjawab kepada pengelola untuk melaporkan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi, adalah salah satu informasi yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Septoaji, 2002).

Untuk mengkomunikasikan ketidakharmonisan dalam pengelolaan perusahaan antara prinsipal dan agen diperlukan suatu pengelolaan perusahaan yang transparan. Dalam perkembangan pengelolaan perusahaan pada beberapa waktu lalu telah diperkenalkan suatu tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Tata kelola perusahaan ini lebih dikenal dengan nama *good corporate governance* (GCG).

Sarnianto, (2001), mengatakan bahwa *Good corporate governance* tidak menjamin kinerja bisnis bagus, tetapi bisa mengangkat nilai saham. Lebih jauh Chandra dan Sarnianto, (2005), menjelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman GCG yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001.

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia, Lembaga riset yang berkantor pusat di Hong Kong yaitu *Political and Economic Risk Consultancy*, menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk kedua dalam GCG dengan skor 8,33 pada 2001 dan 8,29 pada 2000, dengan skor 0 sebagai yang terbaik dan skor 10 yang terburuk (Djatkiko, 2001). Sedangkan di Indonesia sejak tahun 2001 telah dilakukan survei tahunan tentang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA. Adapun jumlah perusahaan yang bersedia dan ikut serta dalam survei ini adalah:

Tabel 1.1.
Jumlah perusahaan yang ikut di survey

Tahun	Σ Perusahaan	Σ Perusahaan yang disurvei	Status
2001	52	22	Termasuk dalam indeks LQ 45 di BEI
2002	321	33	Terdaftar di BEI
2003	333	31	Terdaftar di BEI
2004	333	22	Terdaftar di BEI

Sumber: Sumariyati dan Poeradisastra, (2005).

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, nampak bahwa jumlah perusahaan yang bersedia untuk ikut di survey dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, namun bila dilihat dari manfaat survey, dapat menjadi *benchmark* bagi perusahaan yang di survey. Menurut Sumariyati dan Poeradisastra, (2005) jika perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG (transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan responsibilitas) secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya, mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi, para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik – yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Almilia dan Sifa (2006) dalam penelitiannya tentang reaksi pasar

pada saat pengumuman CGPI pada perusahaan yang masuk sepuluh besar CGPI menunjukkan hasil yang signifikan.

Berbagai penelitian tentang *Corporate Governace* telah dilakukan oleh para peneliti, misalnya Marihot dan Doddy (2007), Hamonangan dan Mas'ud (2006), Boediono (2005) dan Klein (2002) serta Chtourou *et al*, (2001) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006), namun penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan pada hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba atau *corporate governance* dan kualitas laba.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Weber (2006) sedikit berbeda dengan peneliti–peneliti di atas, dimana dalam penelitian ini variabel *corporate governance* digunakan sebagai variabel moderating. Weber (2006) ingin melihat bagaimana hubungan para pembuat keputusan dalam perusahaan yaitu para eksekutif dengan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini dilakukan karena adanya penggunaan kompensasi ekuitas yang diberikan kepada para eksekutif telah mengalami perkembangan selama satu dekade terakhir.

Weber (2006) berpendapat bahwa kekayaan yang dimiliki para eksekutif dipengaruhi oleh adanya kepemilikan saham yang dikuasai oleh eksekutif. Kepemilikan saham ini terjadi karena adanya kompensasi ekuitas yang dibuat untuk menyamakan insentif eksekutif dan pemegang saham dengan memberikan status kepemilikan saham kepada eksekutif dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, kompensasi berbasis ekuitas memberikan insentif bagi manajer untuk memanipulasi hasil akuntansi untuk keuntungan pribadi (Weber, 2006). Hasil penelitiannya, Weber (2006) menemukan bahwa sensitivitas kekayaan eksekutif berhubungan positif dengan ruang lingkup akrual abnormal baik yang positif maupun negatif sehingga menunjukkan bahwa sensitivitas kekayaan berhubungan dengan manajemen laba.

Tujuan utama dari *corporate governance* adalah minimalisasi biaya perusahaan (*agency costs*) yang berasal dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian (Weber, 2006). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme `governance` yang digunakan untuk mengurangi biaya perusahaan; namun, kepemilikan juga menciptakan insentif bagi seorang manajer yang secara oportunistik memanipulasi harga saham (Stein, 1989). Jika suatu perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik, maka potensi seorang manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba, dapat di kontrol oleh *governance*. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran bahwa apakah kekuatan *corporate governance* memperlemah hubungan antara sensitivitas kekayaan eksekutif dan manajemen laba atau tidak, maka dalam penelitian ini *corporate governance* dimasukkan sebagai variabel *moderating*.

Dengan adanya perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian oleh Weber (2006) dengan peneliti – peneliti lainnya, maka peneliti merasa tertarik untuk mereplikasi penelitian dari Weber, (2006), yang menguji hubungan antara kompensasi berbasis saham eksekutif dan manajemen laba, mengetahui kebenaran bahwa hubungan tersebut dipengaruhi oleh *corporate governance*, serta mengamati hubungan akrual abnormal dengan sensitivitas kekayaan eksekutif terhadap perubahan harga saham. Namun dalam replikasi ini, peneliti tidak melakukan replikasi murni dari jurnal Weber (2006) karena ada beberapa penyesuaian yang penulis lakukan sesuai dengan ketersediaan data di Indonesia.

Sensitivitas dalam penelitian Weber (2006) adalah sensitivitas total yang terdiri dari sensitivitas kekayaan eksekutif berbasis saham dan sensitivitas kekayaan eksekutif berbasis opsi. Dalam penelitian ini, peneliti kesulitan dalam memperoleh data tentang opsi, maka peneliti hanya meneliti tentang sensitivitas kekayaan eksekutif berbasis harga saham. Sedangkan manajemen laba di proksi dengan diskresionari akrual atau akrual abnormal, dan *corporate governance* di

proksi dengan struktur dewan komisaris (yang meliputi jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris *outside* dan jumlah rapat dewan komisaris), struktur kepemilikan dan lingkungan institusional.

Selain sensitivitas kekayaan berbasis opsi, dalam penelitian ini, peneliti juga tidak memasukkan dua alat ukur dari *Corporate Governance* yaitu jumlah rapat dewan komisaris, dan *institutional environment* yang di proksi dengan *governance score* yang dikembangkan oleh Gompers *et al.* (2003). Hal ini dilakukan karena ketersediaan data yang tidak mendukung untuk menggunakan alat ukur tersebut.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti akan menguji hubungan antara Sensitivitas Kekayaan Eksekutif dengan Manajemen Laba, yang dimoderating oleh *Corporate Governance*. Adapun pengujian dilakukan pada perusahaan *go* publik di BEI tahun 2005 s/d 2007.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah bahwa kompensasi berbasis ekuitas yang diberikan kepada para eksekutif telah memicu keinginan untuk melakukan tindakan manipulasi data dengan melakukan manajemen laba, yang secara *opportunistic* digunakan untuk memaksimalkan kekayaan eksekutif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan sensitivitas kekayaan eksekutif. Untuk itu, diharapkan bahwa perusahaan yang memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat meminimalisir tindakan manajemen laba oleh para manajer.

Dengan demikian, sesuai latar belakang masalah, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara Sensitivitas Kekayaan Eksekutif dengan manajemen laba ?
2. Apakah kekuatan *Governance* memperlemah hubungan antara Sensitivitas Kekayaan Eksekutif dengan manajemen laba ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menganalisis hubungan antara Sensitivitas Kekayaan Eksekutif dengan manajemen laba.
2. Menganalisis pengaruh kekuatan *Governance* dapat memperlemah hubungan antara Sensitivitas Kekayaan Eksekutif dengan manajemen laba atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam:

1. Memberikan masukan bagi pemilik perusahaan bahwa kompensasi eksekutif berbasis ekuitas (harga saham) yang selama ini dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk menurunkan konflik-konflik insentif antara pemilik dan pengelola, tetapi juga dapat menghasilkan insentif bagi eksekutif untuk memanipulasi harga saham secara *opportunistic*.
2. Memberikan masukan bagi kalangan praktisi dan akademisi bahwa variabel *corporate governance* dapat digunakan juga sebagai variabel *moderating*.
3. Memberikan masukan bagi kalangan praktisi bahwa sensitivitas kekayaan yang dimiliki oleh para eksekutif tidak hanya dipengaruhi oleh gaji atau bonus, tetapi juga

dipengaruhi oleh kepemilikan saham yang dikuasai oleh eksekutif karena adanya perubahan harga saham.

4. Bagi peneliti lain, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
5. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian teoritis dan referensi dalam perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia.